

Baretha Meisar Titioka¹⁾
Mugi Harsono²⁾
Astrid Jacquelen Debby Siahainenia³⁾

¹Politeknik Negeri Ambon

²Universitas Sebelas Maret Surakarta

³BPSDM Provinsi Maluku

titiokabarce@yahoo.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 4, No. 2, September 2023

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023-04-10

Accepted; 2023-05-18

Published; 2023-05-23

Abstract

Social capital is a concept that is still relevant and contextual in responding to the socio-economic dynamics that live and develop in society. The essence of the concept of social capital is the construction of beliefs, norms, and social networks, whose dimensions are cognitive, structural, and relational. The purpose of this article is to examine the concept of social capital from the aspects of ontology, epistemology, and axiology. To support this research, a literature review is used as a methodology, explaining the emergence of the concept of social capital, further developing the theory of social capital, and reviewing the results of previous studies. The purpose of this study is to provide a more comprehensive picture of the concept of social capital that can be used in the context of managing Village Owned Enterprises (BUMDes), taking into account its antecedents and consequences to provide research material on the relationship of social capital in BUMDes management.

Keywords ; Social Capital, BUMDes Management, Ontology, Epistemology, Axiology

Pendahuluan

Modal sosial merupakan faktor penentu dalam menciptakan harmonisasi sosial untuk memanfaatkan potensi ekonomi secara maksimal yang dapat menguntungkan organisasi dan kesejahteraan orang-orang dalam organisasi. Modal sosial merupakan sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat dan tidak pernah habis, walaupun terus-menerus digunakan, tetapi tumbuh. Sebaliknya, jika tidak digunakan, modal sosial justru rusak. Inti dari konsep modal sosial adalah membangun kepercayaan, norma dan jaringan sosial.

Peneliti sebelumnya telah memperhatikan bahwa konsep dan penerapan modal sosial selalu disesuaikan dengan topik dan penelitian, dimana modal sosial masih belum memiliki makna yang mutlak karena perbedaan yang diamati. Secara filosofis, modal sosial merupakan modal alamiah masyarakat dalam hubungan sosial, yang timbul dari sistem nilai, norma, kepercayaan dan saling percaya, jaringan sosial, persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan dan beberapa kearifan lokal yang berkembang. Pada masyarakat yang sedang berkembang, modal sosial menjadi salah satu alternatif pengembangan masyarakat. Karena masyarakat sebenarnya sangat komunal dan memiliki banyak nilai yang dapat mendukung pengembangan dan penguatan modal sosial itu sendiri. Modal Sosial memberikan wawasan tentang pentingnya kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai pilar penting pembangunan masyarakat.

Modal sosial adalah perekat sosial yang membantu orang dan organisasi bekerja menuju tujuan bersama. Modal sosial muncul dari hubungan antar individu dalam aktivitas kesehariannya sebagai hasil koneksi dan jaringan sosial yang dilandasi rasa saling percaya dan nilai-nilai bersama. Hal ini adalah bagian penting dari modal sosial yang ada di berbagai institusi/organisasi. Hubungan sosial ini berjalan ketika terdapat ruang bagi masyarakat untuk menciptakan interaksi sosial dan dialog antar masyarakat, termasuk masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, dengan tujuan merancang dan menghasilkan apa yang diharapkan masyarakat dari pelayanan publik. Jürgen Habermas menyebut pendekatan elemen modal sosial ini sebagai ruang publik dan kebijakan publik deliberative (kebijakan publik yang dikonsultasikan dengan publik) dalam kerangka aktivitas komunikasi.

Konsep modal sosial merupakan salah satu komponen terpenting yang mendukung model pembangunan manusia, karena menempatkan manusia sebagai subjek utama yang menentukan arah pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dan kemampuan mengatur diri sendiri menjadi penting karena keberhasilan pembangunan ditentukan oleh peran aktif masyarakat dan didukung kuat oleh kekuatan modal sosial masyarakat. Kekuatan

modal sosial, bila digunakan secara maksimal, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, tetapi juga pada peningkatan akses sumber daya kehidupan yang juga ditentukan oleh tersedianya jaringan dan saling percaya dalam masyarakat.

BUMDes memiliki karakteristik usaha sosial. Dengan karakteristik tersebut, pengelolaan BUMDes memiliki *unique selling point* yaitu BUMDes harus bertanggung jawab secara finansial dan sosial. Perusahaan sosial cenderung bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial tetapi juga untuk berbisnis melalui mekanisme pasar (Widiastuti, Putra, Utami, & Suryanto, 2019). BUMDes memiliki misi sosial dalam arti keberadaannya harus mampu mengatasi permasalahan sosial di desa seperti masalah pekerjaan, sampah, air minum, listrik dan pelayanan dasar yang murah. Namun BUMDes juga memiliki usaha, sehingga hasil usaha tersebut dapat menunjang kelangsungan hidupnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep modal sosial dari dimensi filosofis ilmu pengetahuan yaitu dari dimensi ontologis, dimensi epistemologis dan dimensi aksiologis, guna memperkaya literatur terkait kajian manajemen BUMDes. Sesuai dengan kerangka penulisan artikel ini, pembahasan berikut ini berkaitan dengan tinjauan literatur, metodologi dan hasil.

Kerangka Teoritis

Modal Sosial

Pada kenyataannya sumber daya sangat berharga ketika dikelola dan digunakan dengan cara sebaik mungkin. Sumber referensi dilihat dalam konteks kebutuhan mereka. Ketika sumber daya dikaitkan dengan investasi, sumber daya menjadi modal. Modal sosial merupakan sarana penting dan penting yang berdampak positif dalam menunjang dan meningkatkan kinerja lembaga/organisasi. Modal sosial memiliki dimensi yang sangat kompleks karena menekankan pada hubungan setiap individu yang hidup dan berinteraksi dalam kelompok/komunitas sosialnya. Modal sosial merupakan bentuk hubungan yang ideal dalam kegiatan ekonomi. Modal sosial tercipta melalui hubungan yang harmonis yang digunakan dalam komunitas, organisasi/Lembaga dan masyarakat. Hubungan ideal ini melampaui individualitas. Keharmonisan ini mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Modal sosial dapat membantu memecahkan masalah warga negara. Itulah sebabnya modal sosial berperan penting dalam memfungsikan dan memperkuat komunitas,

organisasi/lembaga dan masyarakat. Modal sosial mencirikan bisnis yang menguntungkan. Modal sosial dipandang sebagai sumber daya yang mencakup jaringan dan hubungan yang dipandu oleh norma-norma Bersama dan berdasarkan rasa saling percaya dan kerjasama untuk saling menguntungkan melalui kelangsungan produktivitas masyarakat.

Pada dasarnya hanya orang (komunitas sosial) yang memiliki modal sosial yang kuat, menumbuhkan semangat gotong royong, berkembang sendiri dan menggunakan sumber kekuatan luar (bantuan luar negeri) sebagai faktor pendukung. Dengan bantuan modal sosial, visi bersama tercipta, dimana ide-ide bersama dibuat dan direncanakan, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama untuk kemajuan bersama. Modal sosial terutama mengacu pada nilai-nilai jaringan yang menghubungkan orang-orang tertentu (yang biasanya memiliki beberapa kesamaan, seperti pekerjaan yang sama, tempat tinggal yang sama, asal suku yang sama atau agama yang sama) antara orang yang berbeda dengan norma timbal balik (timbal balik). Modal sosial menekankan potensi kelompok dan pola relasional antara individu dan kelompok dalam suatu kelompok dimana terdapat ruang untuk memperhatikan jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan tentang orang lain yang muncul dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Inti dari modal sosial adalah kemampuan orang-orang dari suatu unit atau kelompok untuk berjejaring untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial adalah konsep baru yang muncul untuk memberikan pemahaman yang luas kepada semua pemangku kepentingan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam menciptakan harmonisasi sosial untuk potensi ekonomi langsung terbaik yang bermanfaat bagi organisasi dan kesejahteraan individu dalam organisasi.

Aspek Ontologi Modal Sosial

Gagasan konsep modal sosial pertama kali dikembangkan oleh seorang pendidik dari Amerika Serikat bernama Lidya Judson Hanifan. Dalam bukunya yang berjudul *The Rural School Community Centre*, Hanafi menjelaskan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti kekayaan atau uang, melainkan makna kiasan yang dirujuk oleh aset, riil atau modal yang ada dalam masyarakat, khususnya berupa barang, karnauan, persahabatan, simpati timbal balik, hubungan sosial dan kerja sama asosiatif antar individu, yang kemudian membentuk kelompok sosial (Hanifan, 1916).

Konsep modal sosial berkembang dengan pandangan Pierre Bourdieu, (1986) seorang sosiolog Perancis dalam artikelnya *Forms of Capital*, bahwa pengertian modal tidak hanya dilihat dalam teori ekonominya, tetapi perlu mengetahui berbagai bentuk

transaksi, yang diasumsikan dalam teori ekonomi. menjadi non-ekonomi karena mereka tidak secara langsung mempengaruhi kepentingan material. Maksud Bourdieu adalah setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai dengan modal immaterial berupa modal budaya dan modal sosial. Pierre Bourdieu, (1986) kemudian mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan alokasi akses kelembagaan yang masih didasarkan pada pengetahuan dan saling pengakuan. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota sekelompok orang, anda akan mendapat dukungan dari modal yang dipegang oleh kolektif. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa jumlah modal sosial yang dipegang anggota kelompok bergantung pada kuantitas dan kualitas jaringan hubungan yang dihasilkan, serta pentingnya volume modal ekonomi, budaya dan masyarakat dipegang oleh orang-orang dalam jaringan hubungan (Pierre Bourdieu, 1986).

Pemikiran tentang modal sosial terus berkembang, baik dari sudut pandang teoretis untuk memahami dinamika masyarakat, maupun sebagai alat yang efektif untuk membawa perbaikan ekonomi. Hal ini telah dipelajari secara serius oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti (Robert D. Putnam, Robert Leonardi, 1993; Coleman, 1988; dan Fukuyama Francis, 2002). Coleman, (1988) mengidentifikasi tiga faktor kunci sebagai pilar modal sosial, yaitu kepercayaan, mobilitas informasi, dan standar yang harus dipenuhi dengan sanksi yang jelas dan efektif. Dua tahun kemudian, dalam bukunya *Foundations of Social Theory*, ia menyatakan bahwa modal sosial juga merupakan modal ekonomi produktif. Tanpa modal sosial, seseorang tidak dapat secara optimal meraih keuntungan materi dan kesuksesan lainnya. Tetapi Coleman juga berpendapat bahwa modal sosial dalam beberapa hal dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, seseorang yang memiliki jaringan hubungan yang baik dengan pejabat pemerintah akan memperoleh berbagai keuntungan dari hubungan tersebut, namun ketika terjadi perbedaan kepentingan, maka individu tersebut secara otomatis kehilangan hak untuk terus mendekati dan mempengaruhi kerusakan yang dideritanya (Coleman, 1988).

Kemudian pada tahun 1993, Robert Putnam dalam bukunya *Making Democracy Work; Civil Traditions in Modern Italy* mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan Bersama. Pemikiran Putnam mengacu pada realitas pengalaman yang terjadi di Polandia. Pemerintah Polandia saat itu berusaha mempertemukan para ahli dan pengusaha terlepas dari perbedaan ideologi mereka untuk membangun Polandia pasca-kornunis. Bahkan berbagai Japisan masyarakat dengan latar belakang ideologi

yang berbeda diterima dengan baik dan dipercaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan pemulihan dan penguatan ekonomi Polandia. Bukti dari Polandia menyangkal bahwa modal sosial berupa jaringan hubungan dan kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam memfasilitasi terwujudnya pembangunan ekonominya (Robert D. Putnam, Robert Leonardi, 1993).

Fukuyama Francis, (2002) sosiolog Jepang-Amerika kelahiran Chicago, dalam bukunya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* menyatakan bahwa kondisi kemakmuran dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan di antara warganya. Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat bahwa modal sosial menjadi lebih kuat jika dalam masyarakat diterapkan norma-norma saling mendukung dan Kerjasama yang erat melalui jaringan hubungan social institusional. Fukuyama menganggap kepercayaan terkait dengan asal-usul budaya, terutama yang terkait dengan moralitas dan etika populer. Berdasarkan hal ini ia menyimpulkan bahwa derajat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Fukuyama menyatakan bahwa kepercayaan muncul Ketika setiap orang memiliki nilai moral yang lengkap untuk mempromosikan perilaku jujur di antara warga negara Fukuyama Francis, (2002).

Pendapat lain oleh Ronald S. Burt, (2004) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk saling berhubungan (*relate*) satu sama lain dan kemudian menjadi kekuatan yang sangat penting tidak hanya bagi kehidupan ekonominya tetapi juga bagi seluruh masyarakat aspek-aspek lain dari keberadaan sosial. Cox, (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian proses hubungan manusia yang didukung oleh jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan efisien untuk keuntungan bersama dan etika bersama. Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, (2021) mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara luas, khususnya kualitas hubungan sosial.

Modal sosial memiliki beberapa aspek kunci dan penting sebagai dasar penerapan tata kelola organisasi sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan untuk mencapai tujuan Bersama setiap individu dalam organisasi. Bain dan Hicks (1998) dalam Rusydan Fathy, (2019) mengusulkan dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk

mengembangkan alat untuk mengukur keberadaan modal sosial. Dimensi pertama, yang disebutnya dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan timbal balik yang mengarah pada terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk mencapaitujuan bersama. Dimensi modal sosial yang kedua adalah dimensi struktural, yang tampak dalam bentuk susunan dan ruang lingkup organisasi dan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal, memfasilitasi dan mendorong terselenggaranya kegiatan kolektif yang membawa manfaat, manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Aspek struktural ini penting karena berbagai upaya pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui lembaga-lembaga sosial di tingkat lokal. Aspek struktural modal sosial, seringkali dalam bentuk jaringan hubungan di dalam institusi, mendapat perhatian khusus ketika mempertimbangkan pentingnya modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Melihat dimensi modal sosial yang terus berkembang, ada juga yang disebut dimensi relasional untuk menyempurnakan dimensi modal sosial yang diperkenalkan oleh Bain dan Hicks.

Menurut Nahapiet dan Ghoshal (1998) dalam Abbasi & Malik, (2015) modal sosial terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi relasional dan dimensi kognitif. Pendapat ini dijelaskan lebih lanjut oleh Oliveira J. F, (2014) yang menyatakan bahwa aspek struktural modal sosial merupakan model hubungan yang terjadi antar aktor. Dimensi struktural mencakup tiga faktor, yaitu jumlah hubungan yang dimiliki, ragam hubungan, dan posisi atau kekuatan hubungan yang dimiliki. Nahapiet & Ghoshal, (1998) menyatakan bahwa aspek struktural berfokus pada sifat sistem sosial dan hubungan jaringan secara umum. Dimensi relasional mengungkapkan lebih banyak karakteristik hubungan yang terjadi antar hubungan. Dimensi hubungan ini mungkin bergantung pada kualitas hubungan antar hubungan. Inti dari aspek ini adalah kepercayaan, hubungan saling percaya, akuntabilitas dan umpan balik yang diterima. Aspek kognitif menunjukkan bahwa banyak persamaan yang harus ada dalam suatu hubungan. Faktor yang terkandung dalam dimensi kognitif meliputi norma bersama, aturan tindakan dan pandangan bersama (Abbasi & Malik, 2015). Aspek modal sosial dipecah menjadi blok bangunan modal sosial. Kajian dasar modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat untuk membentuk entitas koperasi atau kelompok jaringan.

Aspek Epistemologi Modal Sosial

Penelitian tentang modal sosial dalam hubungannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah cukup banyak dilakukan, dimana penggunaan variabel modal sosial untuk mengukur pengaruh atau hubungan akan selalu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan penelitian. Adapun hasil dari penelitian yang menggunakan variabel modal sosial pun sangat variatif, misalnya; penelitian tentang inovasi tata kelola BUMDes melalui modal sosial pada BUMDes Katapanrame menunjukkan hasil bahwa kesuksesan pengelolaan BUMDes karena optimal dalam memanfaatkan modal sosial yang ada berupa kepercayaan, jaringan dan reciprocity dimana penerapannya memberikan efek positif (Endah Wahyuningsih, 2021).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa modal sosial dapat berperan meningkatkan tata Kelola BUMDes yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pengembangan teknologi informasi desa, mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesadaran lingkungan (Siska Katiya Santi, 2018). Peneliti lainnya yaitu Kirowati, (2018) menunjukkan bahwa modal sosial dapat memperkuat kerjasama dan norma dalam pengelolaan BUMDes. Hasil kajian empiris oleh (Intan Paramiarta Ningrum, Wuryaningsih Dwi Sayekti, 2020) berhasil membuktikan bahwa modal sosial mendukung pengembangan organisasi sehingga semakin berkembang dan mampu menyesuaikan kondisi jaman. Dinga, (2014) berpendapat bahwa lingkungan merupakan faktor yang mengikat modal sosial dan efisiensi kelembagaan dalam proses pengembangan usaha ekonomi. Kemudian disarankan agar jaringan di luar desa dapat memberikan nilai tambah bagi BUMDes (Hardika & Putra, 2020). Modal sosial yang rendah menimbulkan keengganan untuk mengungkapkan kepemilikan aset perusahaan secara terbuka (Sidik, 2015). Pengurus BUMDES dan masyarakat berinteraksi secara erat, saling mendukung menjadi penggerak komunikasi dan koordinasi, menumbuhkan rasa saling percaya antara pengurus BUMDES dan anggota masyarakat lainnya yang menguatkan aturan yang saling mendukung (Yumarni, 2019).

Aspek Aksiologi Modal Sosial

Aspek aksiologis, berkenaan dengan kegunaan atau nilai kegunaan ilmu untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan berbagai gejala yang sesuai dengan objek kajian yang dipelajari. Penelitian ini berfokus pada kelebihan atau kegunaan dari konsep modal sosial. Menurut Robert D. Putnam, Robert Leonardi, (1993) manfaat modal sosial antara lain; pertama, memudahkan orang untuk memecahkan masalah umum. Kedua, mengedepankan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk

mencapai keuntungan bersama. Dalam konteks pengelolaan BUMDes, modal sosial dianggap relevan sebagai motor penggerak dalam pengelolaan BUMDes. Alasan utamanya adalah secara filosofis proses pembentukan, pendirian dan pengoperasian BUMDes didasarkan pada kepentingan Bersama masyarakat desa, mereka berharap dengan BUMDes dapat mendorong kegiatan ekonomi desa dan seluruh potensi sumber daya. desa akan menghasilkan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, pertanyaannya adalah bagaimana elemen dasar modal sosial berupa keyakinan, nilai dan jaringan sosial harus menjadi pedoman dan kohesif serta terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan BUMDes.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan memetakan penelitian sebelumnya terkait modal sosial melalui *google scholar* dengan kata kunci modal sosial dan kinerja BUMDes.

Pembahasan

Anteseden dan Konsekuensi Modal Sosial.

Keberadaan dan penerapan modal sosial mempengaruhi dan selalu berdampak pada berbagai aspek strategis, seperti pertumbuhan ekonomi, serta praktik tata kelola, termasuk dengan yang baik, transparan, akuntabel dan profesional. Premis yang dipertimbangkan dalam kajian literasi ini didasarkan pada unsur fundamental modal sosial yang ditekankan oleh Robert D. Putnam, Robert Leonardi, (1993) yaitu jaringan, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Modal sosial memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan kerjasama yang saling menguntungkan. Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur dasar modal sosial;

a. Kepercayaan

Kepercayaan mempengaruhi hubungan jangka panjang dalam komunitas, organisasi/organisasi, dan masyarakat. Kepercayaan berakar pada adanya nilai-nilai bersama yang mendasari terciptanya harapan dan kejujuran dalam komunitas, organisasi/organisasi dan masyarakat, yang diterjemahkan menjadi komitmen untuk mencapai tujuan bersama secara konsisten. Kepercayaan adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian, ketidakpastian dan kemandirian. Kepercayaan didasarkan pada keberanian mengambil resiko dan keyakinan bahwa anggota

komunitas, organisasi/organisasi dan masyarakat saling mendukung. Kepercayaan memiliki potensi besar dalam mewujudkan masyarakat, organisasi/organisasi dan masyarakat yang mandiri. Keyakinan juga mempengaruhi kegiatan ekonominya. Keyakinan meningkatkan aktivitas ekonominya.

b. Norma

Norma jaringan sosial dan kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam komunitas, lembaga/organisasi dan masyarakat, modal sosial melibatkan jaringan sosial, norma dan kepercayaan. Standar berperan dalam melindungi komunitas, organisasi/organisasi dan masyarakat terhadap pengaruh negatif dan destruktif. Norma juga mengatur pola perilaku dalam komunitas, organisasi/organisasi dan masyarakat. Norma bertindak sebagai kontrol untuk perlindungan pembangunan di komunitas, organisasi/organisasi dan masyarakat. Norma sosial membantu menjaga keberlangsungan komunitas, organisasi/organisasi dan masyarakat. Norma sosial juga dimaknai sebagai penangkal pengaruh negatif yang merusak tatanan masyarakat, organisasi/organisasi dan masyarakat.

c. Jejaring Sosial.

Jejaring sosial muncul karena kesamaan misi mencapai kesejahteraan bersama dalam hubungan masyarakat. Jejaring sosial digunakan sebagai sumber penting bagi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jaringan sosial memfasilitasi harapan dan kepercayaan di antara para pelaku jaringan, sehingga tujuan tertentu dapat tercapai. Jejaring sosial mempromosikan nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari pencapaian kemakmuran bersama. Jejaring sosial membangun hubungan positif dari adanya kepercayaan dan nilai-nilai yang dibangun dalam masyarakat. Hubungan positif ini memiliki efek jangka panjang pada jaringan karena hubungan timbal balik para aktor dalam jaringan. Adanya jejaring sosial membantu mengembangkan potensi lokal suatu wilayah dalam kegiatan ekonominya.

Modal Sosial Dalam Manajemen Bumdes

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki ciri khas dalam struktur kelembagaan resmi Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat (NKRI). Desa juga merupakan entitas yang menonjol dalam seluruh pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaan desa sudah ada jauh sebelum berdirinya negara Indonesia. Dalam rangka pembangunan ekonomi pedesaan, dalam rangka meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya

kemandirian dan pengelolaan potensi sumber daya yang ada di desa, telah diterbitkan Undang-Undang Desa Kerajinan pada Juni 2014. Peraturan ini mengatur berbagai kegiatan mobilitas agar desa dapat memenuhi potensinya melalui pengelolaan BUMDes yang profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan.

Fakta bahwa daerah pedesaan merupakan daerah dengan konsentrasi penduduk miskin terbesar di Indonesia adalah nyata dan tidak dapat disangkal. Walaupun kondisi ini masih bertolak belakang dengan kenyataan bahwa desa memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, namun hal ini tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Bahkan dari segi sosiologis, modal sosial desa dengan kekuatan intelektual lokalnya jika dikelola dengan baik akan membawa perubahan baik dari segi pembangunan maupun dari segi social ekonomi komunitas. Untuk mengatasi hal tersebut, tantangan bagi perangkat desa adalah lebih kreatif, lebih semangat dan lebih inovatif dalam pengelolaan desa. Padahal, tidak akan ada desa yang tertinggal jika tidak dikelola dengan baik.

Semua desa di Indonesia tentunya memiliki potensi yang dapat digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus membangun dan memperkuat kelembagaan desa yang berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang sekarang kita BUMDes. Menurut UU Desa Kerajinan No.6 Tahun 2014, Badan Usaha Desa Kerajinan (BUMDes) adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial ekonomi, yang menjadi penyedia layanan bagi masyarakat desa dalam berbagai bidang usaha. Dari filosofi tersebut BUMDes merupakan investasi penting bagi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan awal desa (PADes). Dalam rangka mewujudkan tata kelola BUMDes sebagai usaha produktif di desa perlu mengacu pada prinsip-prinsip BUMDes sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan yaitu kerjasama, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel, berkelanjutan (Madjodjo & Dahlan, 2020).

BUMDes harus mampu menjadi organisasi yang berperan sebagai penggerak ekonomi di desa, mampu menggunakan secara kreatif dan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, agar organisasi ini tumbuh dan berkembang serta menjadi tumpuan usaha pemerintah desa. optimalisasi sumber PAD sejauh ini sangat minim. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk mewujudkan peran BUMDes selain dengan melakukan penataan dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes secara menyeluruh dengan

menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki berupa modal alam, modal manusia dan modal sosial.

Intinya, fokus kajian literasi ini adalah pada dimensi modal sosial. Meskipun kita menemukan bahwa dalam pembangunan ekonomi, modal sosial dalam bentuk jaringan sosial belum dilihat sebagai norma timbal balik dan kepercayaan sebagai aset penting. Ekuitas, disisi lain masih dianggap sebagai kewajiban atau kewajiban (kewajiban). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pada masalah materi dan keuntungan finansial, daripada menghargai martabat manusia. Dengan kata lain, modal sosial mengalami penurunan.

Masyarakat sebagai entitas sosial untuk mengatasi berbagai kesulitan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari luar, tetapi harus secara kolektif merefleksikan dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, termasuk mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kekhawatiran pertama adalah kepemilikan modal sosial (*social capita*). Konsep modal sosial dapat diterapkan untuk memberdayakan dan memberdayakan masyarakat sehingga dapat mencapai pembangunan ekonomi. Prinsip dasar modal sosial adalah kelompok masyarakat harus memiliki nilai social budaya saling menghargai dan kemampuan membangun kerjasama dengan kekuatannya (komunitas) untuk maju dan berkembang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dasar-dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan antara sesama warga dan pemberi bantuan (Gittel, Seidner, & Wimbush, 2010). Robison, Schmid, & Siles, (2002) berpendapat bahwa dalam berbagai transaksi ekonomi, mereka yang memiliki modal sosial akan lebih diuntungkan daripada mereka yang tidak. Menurut Robison, nilai modal sosial seseorang terhadap orang lain ditentukan oleh derajat keberadaan faktor-faktor berupa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain-lain (satu orang ke orang lain).

Pengelolaan BUMDes yang baik dan professional ditentukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu modal sosial. Pentingnya pemahaman dan penerapan elemen dasar modal sosial akan menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas operasional BUMDes, yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan kontribusi pendapatan awal desa dengan harapan pengentasan kemiskinan dan ekonomi pertumbuhan desa akan meningkat. Don Cohen & Laurence Prusak, (2001) menyatakan bahwa mereka yang

tertarik dengan modal sosial percaya bahwa jika modal sosial digunakan, maka akan menghasilkan hasil ekonomi.

Penutup

Kesimpulan

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengkaji konsep modal sosial ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksioma sebagai landasan filsafat ilmu. Penulis berharap penelitian ini dapat mendeskripsikan secara komprehensif tentang konsep modal sosial yang meliputi aspek kognitif, struktural dan relasionalnya serta pemahaman tentang unsur-unsur dasar keyakinan, norma serta jaringan social yang menjadi landasan dalam penelitian ini dan masa depan. Hal ini semakin ditegaskan melalui hasil pemetaan model penelitian sebelumnya yang dilakukan penulis dengan tujuan membantu penulis menentukan variable mana yang ada dalam konsep modal sosial yang mempengaruhi atau memiliki hubungan, termasuk variabel yang tidak memiliki pengaruh atau hubungan dengan konteks/kebutuhan penelitian yang dilakukan.

Penulis menempatkan kajian literasi ini dalam konteks pemahaman modal sosial dalam pengelolaan BUMDes. Antecedent modal sosial adalah kepercayaan, norma dan jaringan sosial. Oleh karena itu, jika kekuatan modal sosial dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi pengelolaan BUMDes berupa kinerja BUMDes akan meningkat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abbasi, A., & Malik, Q. A. (2015). Firms' size Moderating Financial Performance in Growing Firms: An Empirical Evidence From Pakistan. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 334–339. Retrieved from <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1074>.
- Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital Author. *The American Journal of Sociology*, 94(Supplement), 95-S120. Retrieved from [https://faculty.washington.edu/matsueda/courses/587/readings/Coleman 1988.pdf](https://faculty.washington.edu/matsueda/courses/587/readings/Coleman%201988.pdf)
- Cox, E. (1995). A Truly Civil Society. In *The 1995 Boyer Lectures*. Retrieved from [http://www.mapl.com.au/pdf/eva cox.pdf](http://www.mapl.com.au/pdf/eva%20cox.pdf).
- Dinga, E. (2014). Social Capital and Social Justice. *Procedia Economics and Finance*, 8(December 2014), 246–253. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00087-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00087-2).
- Don Cohen & Laurence Prusak. (2001). *In Good Company: How Social Capital Makes*

- Organizations Work*. Boston: Harvard Business School Press.
- Endah Wahyuningsih. (2021). Inovasi Tata Kelola Bumdes Melalui Modal Sosial. *National Conference Multidisciplinary*, 469–478. Retrieved from <https://ejournal.undar.ac.id/index.php/nicma/article/download/365/265>.
- Fukuyama Francis. (2002). *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (4th ed.). Retrieved from <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=17488>.
- Gittel, J. H., Seidner, R., & Wimbush, J. (2010). A Relational Model of How High-Performance Work Systems Work. *Organization Science*, 21(2), 490–506. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1090.0446>.
- Hanifan, L. J. (1916). The Rural School Community Center. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 67(ew Possibilities in Education (Sep., 1916)), 130–138. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1013498>.
- Hardika, A. L., & Putra, I. G. S. (2020). Optimalisasi Manajemen Strategi BUMDes untuk Mewujudkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Desa Langonsari. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 257–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1442>.
- Intan Paramiarta Ningrum, Wuryaningsih Dwi Sayekti, R. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Susu Segar Moo di Kota Bandar Lampung. *JIIA*, 8(1), 116–123.
- Kirowati, L. D. S. & D. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(1), 15–22. Retrieved from <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/60/52>.
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Anggaran untuk Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 187–195. <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/iaj.31055>.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. *The Academy of Management Review*, 23(2), 242–266. <https://doi.org/DOI: 10.2307/259373>.
- Oliveira J. F, W. D. (2014). The Influence of the Social Capital on Business Performance: An Analysis in the Context of Horizontal Business Networks. *Revista de Administracao Mackenzie*, 14(3), 209–235. <https://doi.org/10.1590/S1678->

69712013000300009.

- Partha Dasgupta & Ismail Serageldin. (2021). Social Capital A Multifaceted Perspective. In *The World Bank*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/44824425_Social_capital_A_multifaceted_perspective.
- Pierre Bourdieu. (1986). The Form Of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). <https://doi.org/10.15639/teflinjournal.v29i1/45-71>.
- Robert D. Putnam, Robert Leonardi, R. Y. N. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7>.
- Robison, L. J., Schmid, A. A., & Siles, M. (2002). Is Social Capital Really Capital. *Review of Social Economy*, 60(1), 1–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.280892>.
- Ronald S. Burt. (2004). Structural Holes and Good Ideas. *American Journal of Sociology*, 110(2), 349–399. <https://doi.org/10.1086/421787>.
- Rusy dan Fathy. (2019). Modak Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 36–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21267>.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115–131. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.
- Siska Katiya Santi. (2018). *Peran Modal Sosial Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. 3(2), 145–157. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/social-studies/article/view/12699>.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>.
- Yumarni, H. dan A. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Modal Sosial dan Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Pondok Kubang. *MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Volume 8(No. 2), 78–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i2.1060>.